

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan sektor perekonomian Indonesia kian berkembang pesat. Hal ini nampak dari semakin bertambahnya jumlah pelaku kegiatan usaha. Berbagai upaya yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha bisnis guna memenangkan persaingan. Mulai dari melakukan kegiatan pemasaran hingga pengelolaan keuangan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kepemerintahan yang baik antara lain ditandai dengan adanya pemerintah yang akuntabel dan transparan. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintah negara dimaksudkan untuk mendayagunakan pengolahan sumber-sumber keuangan sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan pembangunan di setiap daerahnya. Hal ini akan terjadi jika semua tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dapat direncanakan secara seksama dan teliti secara terperinci dengan adanya rencana kerja yang baik sebagai pedoman menjalani aktivitasnya.

Sumber pembiayaan anggaran rumah tangga Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan dan berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Menurut Yunita Anggareni dan B.Hendro (2010:126) APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah dalam bentuk peraturan daerah. APBD merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan dalam suatu tahun anggaran. Dalam penyusunan APBD melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Perbedaan substansi antara era sebelum otonomi dengan era

otonomi daerah adalah bahwa kalau sebelumnya dominasi eksekutif sangat besar dan hampir-hampir menafikan peran DPRD dan masyarakat dalam menyusun APBD, berubah ke penyusunan anggaran yang harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik, penyusunannya harus melibatkan DPRD dan masyarakat secara aktif. Untuk itu perlu dibuat aturan ketiga pihak sehingga hak dan kewajibannya jelas.

Menurut **Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin (2007:99)**, APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Dalam pendekatan kinerja ada dua hal penting yang ditekankan yaitu, *output* dan *input*. *Output* (keluaran) menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan input yang digunakan. *Input* (masukan) adalah besarnya sumber-sumber: dana, SDM, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah, Sekda, PPKD, Kepala SKPKD, Kepala SKPD dan Bendahara. Agar setiap SKPD dapat menyusun anggarannya, pemerintah daerah melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan tim anggaran pemerintah daerah menerbitkan pedoman penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran SKPD berdasarkan prinsip-prinsip kinerja dengan Surat Edaran Kepala Daerah. Materi pedoman tersebut meliputi antara lain: kebijakan umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), sandar analisa belanja, tolok ukur kinerja, standar biaya, kode rekening dan formulir RKA-SKPD yang digunakan oleh SKPD untuk menyusun usulan program, kegiatan dan anggarannya.

Menurut **Risnawarifin (2012)**, Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu: (1). Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan

kualitas hidup masyarakat. (2). Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (Scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade offs. (3). Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dalam hal ini berusaha menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan perkembangan dalam penyusunan anggaran tetapi dengan tidak mengabaikan pengukuran kinerja anggaran baik secara mikro dan makro serta pengukuran kinerja anggaran standar biaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berminat untuk menyusun laporan tugas akhir ini mengenai anggaran belanja dengan judul “ PROSEDUR TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN GROBOGAN “

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis menyadari bahwa akan banyak masalah yang timbul pada saat melaksanakan pembahasan masalah yang akan diteliti. Untuk itu penulis membatasi pembahasan pada ruang lingkup masalah yang ada sangkut pautnya dengan penyusunan anggaran belanja.

Agar masalah yang dibahas memperoleh kejelasan, maka untuk membatasi ruang lingkup dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan APBD
2. Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Daerah (APBD)
3. Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

4. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD Tahun 2016 Dinas Bina Marga Kab.Grobogan
5. Rekapitulasi Belanja Langsung menurut program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Kab.Grobogan.
6. Mekanisme Penyusunan DPA-SKPD

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran belanja pada Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1.3.2.1 Bagi Akademisi

1. Dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kinerja pegawai.
2. Dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.

1.3.2.2 Bagi Instansi

1. Hasil yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kegiatan instansi khususnya dalam pengolahan data anggaran dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat menghasilkan anggaran belanja daerah sehingga menghasilkan anggaran belanja daerah yang sesuai dengan perencanaan.

2. Terjalannya hubungan kerjasama antara Instansi dengan Diploma III
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah menjadi suatu informasi untuk mendukung penulisan Tugas Akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memerlukan cara yang tepat untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data tersebut. Dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara sebagai berikut:

1.4.1 Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung (tangan pertama) dari pihak perusahaan yaitu dengan cara wawancara dan observasi pada bagian yang terkait dalam instansi. Dalam hal ini data penulis diperoleh langsung dari Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau melalui perantara seperti buku, literatur, dan media lainnya yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Penulis mengambil data dari *website* dan buku perpustakaan yang sesuai dengan objek penelitian untuk dijadikan acuan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan objek penelitian berdasarkan pengumpulan data dan pengolahan data serta fakta yang relevan pada saat di lapangan, kemudian disusun secara sistematis berdasarkan teori yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan.

1.4.2.1 Studi Lapangan

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari

responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu cara mengamati objek dan hasil pengamatan yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan melakukan pencatatan. Proses observasi dilakukan secara berkala selama tiga bulan, dengan cara mengumpulkan data dan mencatat data-data mengenai anggaran belanja Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan.
- b. Interview, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan relevan seputar masalah yang diteliti.

1.4.2.2 Studi Kepustakaan

Yaitu dengan memperoleh data yang sekunder dengan mempelajari buku-buku guna memperoleh pengertian dasar dan landasan teori yang dibutuhkan dalam permasalahan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan. yang meliputi sejarah singkat berdirinya perusahaan, tugas pokok dan fungsi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi, logo perusahaan, dan bidang usaha perusahaan.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang ruang lingkup penulisan yang telah disampaikan, antara lain tentang Pengertian Pemasaran, Pengertian Anggaran, Tujuan dan fungsi Anggaran, Jenis-jenis Anggaran, Keunggulan dan Kelemahan anggaran, Prosedur penyusunan anggaran dan Tujuan penyusunan anggaran Pada Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya.